Setyaki
Jurnal Studi Keagamaan Islam
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
E-ISSN : 2987-0747
DOI : 10.59966/setyaki.v4i3.1970

Wahyu Pascakenabian dan Makna *Khatam Al-Nabiyyin*: Kajian Komparatif atas Teks Ahmadiyah Qadian dan Tafsir Sunni

Maswar A[1], Suni Kadir[2], Suraya Atamimi[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
Email: maswar.abdulla.yamma@gmail.com[1], surnikadir@uindatokarama.a.c.id[2], attamimisoraya@gmail.com[3]

Diserahkan tanggal 14 Juli 2025| Diterima tanggal 17 Oktober 2026 | Diterima tanggal 21 Oktober 2026

Abstract:
Differences over the finality of prophethood and the possibility of divine communication after Muhammad constitute a major point of disagreement between the Qadian branch of the Ahmadiyya Muslim Community and mainstream Sunni theology. This article examines how the two traditions interpret khatam al-nabiyyin in Qur'an 33:40 and how their readings relate to distinctions among law-bearing prophethood, non-law-bearing prophethood, and inspiration. The study uses qualitative library research and comparative textual analysis. Its primary corpus is limited to Ibn Kathir's commentary on Qur'an 33:40 and Mirza Ghulam Ahmad's A Misconception Removed, the English translation of Eik Ghalati Ka Izala (1901). Academic studies of Ahmadi thought and intergroup differences provide the scholarly context. The analysis finds that the Sunni source examined interprets khatam al-nabiyyin as the closure of prophethood, whereas the Qadian Ahmadiyya text distinguishes independent law-bearing prophethood from a form of prophethood understood as dependent on Muhammad. The disagreement is not merely lexical; it concerns the conceptual boundaries of prophethood, the authority assigned to spiritual experience, and the way Qur'anic verses are read alongside hadith. The findings are limited to the selected primary texts and do not claim to represent every internal position within either tradition.

Keywords: *Qadian Ahmadiyya; khatam al-nabiyyin; prophethood; revelation; Sunni exegesis.*

Abstrak *:*
Perbedaan penafsiran tentang penutupan kenabian dan kemungkinan berlanjutnya komunikasi ilahi setelah Nabi Muhammad merupakan salah satu titik utama perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah Qadian dan arus utama teologi Sunni. Artikel ini menelaah bagaimana kedua tradisi memaknai istilah khatam al-nabiyyin dalam QS al-Ahzab [33]:40 serta bagaimana penafsiran itu berhubungan dengan pembedaan antara kenabian pembawa syariat, kenabian yang tidak membawa syariat baru, dan ilham. Penelitian menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan analisis tekstual-komparatif. Korpus utama dibatasi pada tafsir Ibn Kathir atas QS al-Ahzab [33]:40 dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, A Misconception Removed, terjemahan bahasa Inggris dari Eik Ghalati Ka Izala (1901). Literatur akademik tentang pemikiran Ahmadiyah dan perbedaan antarkelompok digunakan sebagai konteks pembacaan. Analisis menunjukkan bahwa sumber Sunni yang dikaji memahami khatam al-nabiyyin sebagai penutupan kenabian, sedangkan teks Ahmadiyah Qadian yang dikaji membedakan kenabian pembawa syariat mandiri dari kenabian yang dipahami bergantung pada Nabi Muhammad. Perselisihan tersebut tidak hanya menyangkut pilihan kata, tetapi juga batas konseptual istilah nabi, otoritas pengalaman spiritual, dan cara menghubungkan ayat dengan hadis. Temuan dibatasi pada dua teks primer yang dipilih dan tidak dimaksudkan mewakili seluruh variasi internal kedua tradisi.

Kata Kunci*:* *Ahmadiyah Qadian; khatam al-nabiyyin; kenabian; wahyu; tafsir Sunni.*

Copyright © 2026, Author
This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang khatam al-nabiyyin menempati posisi penting dalam teologi Islam karena berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad, finalitas kenabian, dan batas otoritas

keagamaan setelah masa kenabian. QS al-Ahzab [33]:40 menyebut Muhammad sebagai rasul Allah dan khatam al-nabiyyin. Ayat ini tidak hanya menjadi dasar pembicaraan tentang urutan para nabi, tetapi juga menjadi titik rujuk ketika umat Islam mendiskusikan klaim kenabian setelah Muhammad. Dalam tradisi tafsir Sunni yang dibahas pada artikel ini, ayat tersebut dibaca bersama hadis-hadis tentang penutupan kenabian sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad (Ibn Kathir, n.d.).

Meskipun demikian, istilah "wahyu" tidak selalu digunakan dalam wacana keagamaan dengan cakupan yang identik. Wahyu kenabian, wahyu yang membawa syariat, ilham, mimpi yang dianggap benar, dan pengalaman spiritual lain perlu dibedakan secara analitis. Perbedaan definisi ini menjadi penting ketika suatu tradisi menegaskan penutupan kenabian, sementara tradisi lain mempertahankan kemungkinan komunikasi ilahi dalam pengertian tertentu. Tanpa memperjelas kategori-kategori tersebut, pembahasan mudah menyamakan pengalaman spiritual dengan kenabian atau sebaliknya, padahal kedua hal itu dapat diberi status teologis yang berbeda. Friedmann (1989) menunjukkan bahwa perdebatan mengenai finalitas kenabian dan bentuk-bentuk otoritas spiritual merupakan unsur penting dalam sejarah pemikiran Ahmadiyah serta memiliki latar konseptual dalam tradisi Islam yang lebih luas.

Istilah "Ahmadiyah" juga perlu digunakan secara spesifik. Sejarah gerakan ini mencakup perbedaan internal yang berkembang menjadi cabang Qadian dan Lahore. Perbedaan tentang status kenabian Mirza Ghulam Ahmad merupakan salah satu garis pembeda penting: cabang Qadian menerima penggunaan kategori nabi bagi pendirinya dengan penjelasan teologis tertentu, sedangkan cabang Lahore pada umumnya menekankan kedudukannya sebagai mujaddid dan muhaddath. Beck (2005) menjelaskan bahwa pembedaan ini berpengaruh pada cara organisasi Muslim lain, termasuk Muhammadiyah, menilai kedua cabang tersebut. Karena itu, artikel ini tidak menggunakan satu uraian umum tentang Ahmadiyah untuk mewakili seluruh cabangnya.

Objek utama kajian ini adalah teks Mirza Ghulam Ahmad berjudul A Misconception Removed, terjemahan bahasa Inggris dari Eik Ghalati Ka Izala yang diterbitkan pertama kali pada 1901. Teks tersebut secara eksplisit membahas hubungan antara klaim status kenabian pendirinya dan konsep khatam al-nubuwwat. Dalam pengantar penerbitnya, karya ini diposisikan sebagai penjelasan bahwa kenabian yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tidak dianggap membawa syariat independen, melainkan bergantung pada Nabi Muhammad (Ahmad, 2007). Karena sumber tersebut merupakan karya dari dalam tradisi yang dikaji, isinya diperlakukan sebagai representasi argumentasi internal Ahmadiyah Qadian, bukan sebagai penjelasan netral yang harus diterima oleh tradisi lain.

Kajian akademik sebelumnya telah membahas tema ini dari beberapa sudut. Friedmann (1989) menguraikan pemikiran Ahmadiyah mengenai kenabian, pembaruan, dan latar intelektualnya. Beck (2005) menelusuri perpecahan relasional antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah serta memperlihatkan pentingnya membedakan cabang-cabang Ahmadiyah. Di Indonesia, Burhani (2014b) mengkaji kontroversi Ahmadiyah dalam studi perbandingan agama; Burhani (2014a) membahas posisi sosial kelompok yang dilabeli sesat; dan Burhani (2014c) menganalisis penggunaan fatwa terhadap komunitas Ahmadiyah. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan teologis tidak terpisah dari pembentukan identitas dan relasi sosial, tetapi fokus masing-masing tidak sama dengan pembacaan tekstual komparatif yang dilakukan dalam artikel ini.

Burhani (2015) juga menunjukkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an dalam konteks Ahmadiyah di Indonesia dapat menjadi arena penandaan sektarian, sehingga pilihan terjemahan tidak selalu netral dari posisi teologis. Temuan ini mengingatkan bahwa perbandingan atas istilah khatam al-nabiyyin perlu memperhatikan bahasa sumber, pilihan penerjemahan, konteks penafsiran, serta hubungan antara ayat dan hadis. Artikel ini tidak menganggap bahwa satu kata secara otomatis menyelesaikan perbedaan. Sebaliknya, yang diperiksa adalah cara setiap teks

membangun argumentasi, menetapkan makna istilah, dan menentukan otoritas yang dapat diterima setelah masa kenabian.

Dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini tidak mengklaim bahwa perbandingan Ahmadiyah dan Sunni sama sekali belum pernah dilakukan. Kontribusi yang lebih terbatas dan spesifik ialah menyandingkan secara eksplisit satu tafsir Sunni klasik, yaitu penafsiran Ibn Kathir atas QS al-Ahzab [33]:40, dengan satu teks primer Ahmadiyah Qadian yang secara langsung menjelaskan klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Perbandingan ini memungkinkan pembaca melihat titik temu dan titik beda pada level istilah, dasar argumentasi, dan konsekuensi konseptual. Pembatasan korpus juga mencegah kesimpulan yang terlalu luas tentang seluruh ulama Sunni atau semua kelompok Ahmadiyah.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana Ibn Kathir menafsirkan khatam al-nabiyyin dalam QS al-Ahzab [33]:40 dan menghubungkannya dengan hadis? Kedua, bagaimana Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan relasi antara klaim kenabian, penutupan syariat, dan ketergantungan pada Nabi Muhammad? Ketiga, pada titik konseptual apa kedua teks berbeda dalam menetapkan batas komunikasi ilahi pascakenabian? Pembacaan dilakukan dengan memperhatikan konteks masing-masing sumber, definisi istilah yang dipakai, bentuk dalil yang dirujuk, dan kesimpulan yang ditarik. Dengan demikian, artikel bertujuan menjelaskan struktur argumen kedua teks secara cermat, bukan memutuskan kebenaran akidah salah satu pihak.

Pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian dalam penggunaan istilah evaluatif. Ungkapan seperti "sesat", "menyimpang", atau "di luar Islam" hanya dicantumkan apabila dibahas sebagai penilaian dari aktor atau lembaga tertentu dan harus disertai sumber yang jelas. Artikel tidak menggunakan istilah tersebut sebagai suara peneliti. Pembedaan antara deskripsi pandangan internal, analisis akademik, dan penilaian normatif diperlukan agar kajian teologi komparatif tidak berubah menjadi polemik, serta agar perbedaan keyakinan tetap dapat diteliti secara argumentatif dan terukur.

Secara historis, kemunculan Ahmadiyah pada akhir abad ke-19 berlangsung dalam lingkungan intelektual India kolonial, ketika komunitas Muslim menghadapi perdebatan mengenai pembaruan, otoritas agama, dan hubungan Islam dengan tradisi keagamaan lain. Konteks tersebut membantu menjelaskan mengapa gagasan tentang al-Masih yang dijanjikan, tajdid, dan kesinambungan komunikasi ilahi menjadi bagian penting dalam argumentasi Mirza Ghulam Ahmad. Friedmann (1989) menempatkan pemikiran Ahmadiyah dalam sejarah gagasan kenabian dan pembaruan Islam yang lebih panjang. Artikel ini tidak bermaksud menguraikan seluruh sejarah gerakan, tetapi menggunakan konteks tersebut untuk menghindari pembacaan teks primer seolah-olah lahir tanpa latar sejarah dan polemik keagamaan.

Pilihan kata dan penerjemahan juga menjadi persoalan metodologis. Teks yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dalam bahasa Inggris, sedangkan karya asalnya ditulis dalam bahasa Urdu. Perbedaan nuansa antara istilah seperti nabi, rasul, muhaddath, ilham, dan zill dapat menentukan bagaimana sebuah klaim dipahami. Burhani (2015) memperlihatkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an dalam konteks Ahmadiyah di Indonesia terlibat dalam perdebatan tentang otoritas dan identitas keagamaan. Oleh karena itu, artikel ini tidak memperlakukan terjemahan sebagai padanan sempurna bahasa sumber; istilah kunci dipertahankan dalam transliterasi ketika diperlukan dan kesimpulan dibatasi pada hal-hal yang cukup jelas dalam teks yang diperiksa.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, pendekatan komparatif di sini berangkat dari prinsip bahwa tiap teks harus dibaca menurut struktur argumennya sendiri sebelum dibandingkan. Perbandingan dilakukan bukan dengan mengandaikan kesetaraan semua kategori teologis, melainkan dengan menelusuri bagaimana istilah didefinisikan, dalil dipilih, dan konsekuensi ditarik. Prinsip ini memungkinkan analisis mengidentifikasi ketidaksepakatan substantif tanpa mengubah uraian akademik menjadi pengesahan atas salah satu posisi. Dengan

demikian, pembahasan tentang identitas keagamaan dan konsekuensi sosial tetap dipisahkan dari pertanyaan tentang bagaimana masing-masing sumber menafsirkan khatam al-nabiyyin.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis dokumen dan pembacaan tekstual-komparatif. Analisis dokumen sesuai untuk menelaah teks yang diterbitkan sebagai sumber data dan untuk menafsirkan makna yang dikonstruksi di dalamnya secara sistematis (Bowen, 2009). Unit analisis penelitian ialah pernyataan yang secara langsung berkaitan dengan makna khatam al-nabiyyin, finalitas kenabian, kenabian pembawa syariat, dan kemungkinan komunikasi spiritual setelah Nabi Muhammad.

Korpus primer dibatasi pada dua sumber. Sumber pertama adalah tafsir Ibn Kathir atas QS al-Ahzab [33]:40 yang tersedia melalui laman Quran KSU. Sumber ini dipilih karena secara eksplisit menghubungkan ayat tersebut dengan penutupan kenabian dan sejumlah hadis. Sumber kedua adalah A Misconception Removed karya Mirza Ghulam Ahmad, dalam edisi terjemahan bahasa Inggris revisi yang diterbitkan Islam International Publications pada 2007. Teks tersebut dipilih karena secara langsung menguraikan klaim status kenabian pendirinya dan hubungan klaim itu dengan khatam al-nubuwwat (Ahmad, 2007; Ibn Kathir, n.d.).

Literatur sekunder digunakan untuk menempatkan teks dalam konteks historis dan akademik. Friedmann (1989) menjadi rujukan utama mengenai pemikiran Ahmadiyah tentang kenabian dan pembaruan. Beck (2005) digunakan untuk menjelaskan perlunya membedakan cabang Qadian dan Lahore. Artikel-artikel Burhani (2014a, 2014b, 2014c, 2015) digunakan secara terbatas untuk menunjukkan bagaimana perdebatan teologis, tafsir, identitas, dan penerimaan sosial Ahmadiyah telah dibahas dalam penelitian akademik. Sumber-sumber tersebut tidak diperlakukan sebagai pengganti korpus primer, melainkan sebagai konteks dan pembanding untuk mencegah penyederhanaan.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, mengidentifikasi bagian teks yang secara langsung menafsirkan QS al-Ahzab [33]:40 atau menjelaskan hubungan antara kenabian dan wahyu. Kedua, membaca setiap sumber dalam konteks argumentasinya sendiri sebelum membandingkannya dengan sumber lain. Ketiga, mengelompokkan hasil pembacaan ke dalam dimensi makna khatam al-nabiyyin, status kenabian pasca-Muhammad, hubungan dengan syariat, serta otoritas komunikasi spiritual. Keempat, menyusun perbandingan dengan mencatat persamaan, perbedaan, dan batas generalisasi yang dapat ditarik dari sumber.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, atau data lapangan; oleh karena itu, klaim metode wawancara dan triangulasi wawancara dalam naskah awal dihapus. Validitas argumentasi dijaga melalui keterlacakan setiap interpretasi pada sumber yang disebutkan dan pemeriksaan silang dengan literatur akademik. Karena sebagian sumber primer tersedia dalam terjemahan bahasa Inggris dan sebagian penjelasan tafsir tersedia dalam bahasa Arab, analisis juga mengakui bahwa pilihan terjemahan dapat memengaruhi penekanan makna. Penelitian ini terbatas pada dua teks primer sehingga tidak dapat mewakili seluruh variasi pemikiran dalam Sunni maupun semua cabang Ahmadiyah.

PEMBAHASAN

Khatam al-nabiyyin dalam tafsir Sunni

Dalam penafsiran Ibn Kathir atas QS al-Ahzab [33]:40, frasa khatam al-nabiyyin dipahami sebagai penegasan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ibn Kathir menyebut ayat tersebut sebagai dalil yang jelas tentang penutupan kenabian dan menghubungkannya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ia juga mengemukakan hubungan antara kenabian dan kerasulan: setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi merupakan rasul. Karena itu, jika kenabian telah ditutup, kerasulan setelah Muhammad juga tidak dimungkinkan dalam kerangka tafsir tersebut (Ibn Kathir, n.d.).

Argumen Ibn Kathir memperlihatkan pola penalaran intertekstual. Makna ayat tidak dipisahkan dari hadis yang digunakan untuk menerangkan kedudukan Muhammad dalam rangkaian kenabian. Dalam konteks ini, khatam al-nabiyyin bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan proposisi teologis mengenai finalitas kenabian. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa klaim kenabian pasca-Muhammad tidak dapat dilepaskan dari pemahaman ayat dan hadis yang menjadi otoritas bagi tradisi tafsir tersebut.

Namun, simpulan perlu dibatasi pada sumber yang dianalisis. Tafsir Ibn Kathir mendukung kesimpulan bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad, tetapi satu bagian tafsir tidak cukup untuk menyatakan bahwa semua ulama Sunni memiliki penjelasan identik mengenai setiap bentuk ilham, mimpi, kasyf, atau pengalaman spiritual. Perlu dibedakan antara penutupan kenabian dan penilaian terhadap pengalaman spiritual nonkenabian. Artikel ini menggunakan tafsir tersebut untuk menjelaskan makna finalitas kenabian dalam satu sumber Sunni klasik, bukan untuk memetakan seluruh pandangan Sunni tentang wahyu dan ilham.

Khatam al-nubuwwat dalam teks Mirza Ghulam Ahmad

A Misconception Removed merupakan sumber primer yang ditulis untuk menjawab keberatan terhadap klaim status kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Karya ini membedakan nabi yang membawa syariat independen dari status kenabian yang dipahami sebagai bayangan atau manifestasi spiritual yang sepenuhnya mengikuti Nabi Muhammad. Dalam penjelasan internal tersebut, pintu kenabian pembawa syariat dinyatakan tertutup, tetapi komunikasi ilahi dan kategori kenabian dalam pengertian yang bergantung pada Muhammad tetap dipertahankan (Ahmad, 2007). Penjelasan ini dilaporkan sebagai posisi yang dikemukakan teks, bukan sebagai konsensus teologis lintas tradisi.

Secara argumentatif, teks tersebut tidak menghapus finalitas Nabi Muhammad; teks berusaha menentukan makna finalitas dengan membedakan jenis kenabian. Klaim Mirza Ghulam Ahmad diposisikan sebagai turunan, bukan independen, dan tidak dianggap membawa syariat baru. Kerangka ini memungkinkan komunitas Qadian menjelaskan bagaimana pengakuan terhadap pendirinya sebagai nabi dapat dipadukan, menurut keyakinan internal mereka, dengan kedudukan Muhammad sebagai nabi penutup dalam pengertian tertentu. Friedmann (1989) menunjukkan bahwa gagasan tentang kesinambungan kenabian dalam pemikiran Ahmadiyah berkaitan dengan perdebatan yang lebih luas mengenai pembaruan agama, status muhaddath, dan kemungkinan komunikasi ilahi setelah masa kenabian.

Karena itu, tidak akurat jika posisi teks diringkas hanya sebagai "Ahmadiyah meyakini nabi baru setelah Muhammad" tanpa menjelaskan pembatasan yang dikemukakan sumber internal. Ringkasan seperti itu menghilangkan kategori yang justru menjadi pusat argumen teks. Sebaliknya, juga tidak tepat menyatakan bahwa tidak ada perbedaan substantif dengan tafsir Sunni hanya karena teks Ahmadiyah Qadian menegaskan ketergantungan pada Muhammad dan tidak mengklaim membawa syariat mandiri. Perbedaan tetap ada pada penggunaan kategori nabi setelah Muhammad dan pada batas semantik serta teologis yang ditetapkan untuk istilah khatam al-nabiyyin (Ahmad, 2007; Friedmann, 1989).

Pembacaan ini juga perlu membedakan teks pendiri dari keseluruhan sejarah pemikiran Ahmadiyah. Satu karya primer tidak cukup untuk memetakan semua perkembangan istilah dalam tulisan Mirza Ghulam Ahmad, respons penerusnya, atau variasi internal pada setiap periode. Selain itu, edisi bahasa Inggris yang digunakan merupakan terjemahan dari teks Urdu; pilihan penerjemahan dapat memengaruhi nuansa istilah. Untuk publikasi final, penulis sebaiknya memeriksa edisi Urdu atau edisi kritis yang dapat dipertanggungjawabkan dan mencantumkan halaman atau bagian yang tepat bagi setiap klaim penting.

Istilah zill yang muncul dalam argumentasi internal Ahmadiyah Qadian dapat dipahami sebagai metafora ketergantungan atau pencerminan, bukan sebagai klaim bahwa tokoh yang dimaksud membawa misi keagamaan yang sepenuhnya independen. Teks tersebut juga

menggunakan gagasan buruz, yaitu manifestasi spiritual, untuk menjelaskan relasi antara Mirza Ghulam Ahmad dan Nabi Muhammad (Ahmad, 2007). Istilah-istilah ini penting karena membentuk cara teks menghubungkan kontinuitas komunikasi ilahi dengan penutupan syariat. Pembaca yang mengabaikan istilah tersebut dapat kehilangan langkah utama dalam argumentasi sumber primer.

Namun, menjelaskan logika internal suatu doktrin tidak sama dengan menyetujui kesimpulannya. Bagi teks Ahmadiyah Qadian, ketergantungan pada Muhammad dan tidak adanya syariat baru menjadi alasan untuk membedakan klaim Mirza Ghulam Ahmad dari kenabian yang independen. Bagi tafsir Ibn Kathir, penggunaan kategori nabi setelah Muhammad tetap bertentangan dengan penutupan kenabian sebagaimana ia memahami QS al-Ahzab [33]:40 (Ibn Kathir, n.d.). Oleh sebab itu, kedua posisi berangkat dari cara penentuan batas yang berbeda. Ketergantungan pada Nabi Muhammad tidak dengan sendirinya menghapus perbedaan terminologis apabila satu sumber tetap menyebut status pasca-Muhammad sebagai kenabian dan sumber lainnya menolak adanya nabi setelah beliau.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa pembacaan atas satu ayat tidak berlangsung dalam ruang kosong. Setiap teks membawa asumsi mengenai otoritas hadis, makna istilah, dan kategori yang dapat diterima dalam teologi. Karena itu, penelitian tidak cukup hanya menyajikan dua kesimpulan yang berlawanan; penelitian harus memperlihatkan jalur penalaran yang menghubungkan sumber dengan kesimpulan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan analisis dokumen yang menempatkan teks, konteks, dan prosedur interpretasi sebagai bagian dari proses analitis, bukan sekadar sebagai ilustrasi bagi posisi yang telah ditentukan sebelumnya (Bowen, 2009).

Perbandingan struktur argumentasi

Perbandingan kedua sumber memperlihatkan bahwa ketidaksepakatan tidak berhenti pada perbedaan kesimpulan, tetapi menyangkut definisi awal yang dipakai untuk membaca sumber agama. Dalam tafsir Ibn Kathir, khatam al-nabiyyin mengandung penutupan kenabian sehingga klaim status nabi pasca-Muhammad tidak diterima. Dalam teks Mirza Ghulam Ahmad, penutupan itu diterangkan melalui pembedaan antara kenabian pembawa syariat independen dan kenabian yang bergantung pada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kedua sumber membangun batas konseptual yang berbeda ketika menentukan apakah suatu status pasca-Muhammad dapat disebut kenabian.

Tabel 1. Perbandingan struktur argumentasi

Dimensi	**Tafsir Ibn Kathir**	**Teks Mirza Ghulam Ahmad**
Makna khatam al-nabiyyin	Penutupan kenabian; tidak ada nabi setelah Muhammad.	Penutupan kenabian pembawa syariat independen, dengan tetap mempertahankan kategori kenabian yang bergantung pada Muhammad.
Penggunaan dalil	Ayat dibaca bersama hadis tentang berakhirnya kenabian.	Ayat dan tradisi kenabian dibaca melalui pembedaan antara kenabian independen dan manifestasi yang mengikuti Muhammad.
Otoritas spiritual	Tidak ada kenabian baru setelah Muhammad dalam sumber yang dikaji.	Komunikasi ilahi dan status kenabian dalam pengertian tertentu masih dimungkinkan menurut teks internal.
Batas kesimpulan	Satu tafsir klasik; tidak mewakili seluruh keragaman	Satu karya primer; tidak mewakili seluruh tulisan atau

	Sunni.	semua cabang Ahmadiyah.

Sumber: disusun penulis berdasarkan Ibn Kathir (n.d.) dan Ahmad (2007), dengan konteks historis dari Friedmann (1989).

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kedua tradisi menggunakan perangkat penalaran yang berbeda untuk menentukan batas istilah kenabian. Sumber Sunni yang dikaji menafsirkan ayat sebagai penutupan rangkaian nabi dan memperkuatnya dengan hadis. Sementara itu, teks Ahmadiyah Qadian menempatkan pembedaan antara kenabian pembawa syariat independen dan kenabian yang bergantung pada Muhammad sebagai kunci untuk mempertahankan klaim pendirinya. Dalam konteks perbandingan, istilah yang tampak sama tidak selalu berfungsi dalam struktur doktrin yang sama.

Perbedaan itu tidak seharusnya disederhanakan menjadi pertentangan antara pihak yang mengakui wahyu dan pihak yang menolak seluruh komunikasi ilahi. Dalam sumber Sunni yang dianalisis, klaim kenabian setelah Muhammad ditolak. Akan tetapi, penetapan sikap Sunni terhadap ilham, mimpi yang benar, atau pengalaman rohani nonkenabian memerlukan sumber yang secara khusus membahas kategori-kategori tersebut. Sebaliknya, teks Ahmadiyah Qadian menyatakan bahwa komunikasi ilahi dapat terus berlangsung tanpa syariat baru, tetapi menghubungkannya dengan status kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Titik perselisihan utama terletak pada relasi antara komunikasi ilahi dan kategori kenabian, bukan semata-mata pada kemungkinan pengalaman spiritual secara umum.

Batas istilah wahyu dan otoritas keagamaan

Perbandingan ini memperlihatkan pentingnya membedakan "wahyu" sebagai istilah luas dalam penggunaan bahasa dengan wahyu kenabian sebagai kategori teologis. Apabila istilah wahyu digunakan tanpa definisi, pembaca dapat menyimpulkan bahwa semua bentuk ilham mempunyai kedudukan yang sama dengan wahyu kepada nabi. Kesimpulan tersebut tidak didukung oleh korpus yang ditelaah. Karena itu, artikel menggunakan istilah "komunikasi ilahi" sebagai kategori deskriptif yang lebih luas, sedangkan istilah "wahyu kenabian" dipakai secara lebih khusus ketika membahas klaim yang dikaitkan dengan status nabi.

Bagi tafsir Ibn Kathir, finalitas kenabian berarti tidak ada nabi setelah Muhammad, dan klaim yang bertentangan dengan prinsip itu ditolak dalam kerangka tafsirnya (Ibn Kathir, n.d.). Bagi teks Mirza Ghulam Ahmad, finalitas Nabi Muhammad dipertahankan dengan penjelasan bahwa status kenabian pendirinya bersifat subordinat dan tidak membawa syariat independen (Ahmad, 2007). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua teks menggunakan kriteria yang tidak sama untuk menentukan batas konsep kenabian. Artikel ini tidak menyamakan kedua posisi tersebut, tetapi menjelaskan struktur argumen yang mendasarinya.

Perdebatan teologis mengenai batas keanggotaan dalam Islam kemudian berinteraksi dengan konteks sosial dan kelembagaan. Penelitian Burhani (2014a, 2014c) memperlihatkan bahwa pelabelan teologis dan penggunaan fatwa turut membentuk posisi sosial komunitas Ahmadiyah di Indonesia. Burhani (2014b) juga menempatkan Ahmadiyah dalam kontroversi mengenai studi perbandingan agama, sedangkan kajiannya tentang penerjemahan Al-Qur'an menunjukkan bahwa teks dan pilihan bahasa dapat menjadi arena penegasan batas kelompok (Burhani, 2015). Rujukan tersebut penting sebagai konteks, tetapi tidak boleh dipakai untuk menggantikan analisis doktrin dalam teks primer.

Dengan demikian, terdapat dua tingkat analisis yang harus dipisahkan. Tingkat pertama adalah tingkat tekstual-teologis: apa yang diklaim masing-masing sumber, bagaimana istilah didefinisikan, dan dalil apa yang digunakan. Tingkat kedua adalah tingkat sosial: bagaimana perbedaan itu ditafsirkan, dilembagakan, atau digunakan dalam relasi antarkelompok. Artikel ini terutama membahas tingkat pertama dan menggunakan literatur sosial hanya untuk menerangkan relevansi konteks. Pembedaan tersebut menghindarkan kesalahan logika yang menganggap dampak sosial suatu doktrin dengan sendirinya membuktikan benar atau salahnya doktrin itu.

Implikasi bagi kajian teologi komparatif

Perbandingan teks keagamaan menuntut pemisahan antara tiga lapisan. Lapisan pertama ialah deskripsi: bagaimana penulis atau tradisi yang diteliti menyatakan keyakinannya. Lapisan kedua ialah interpretasi: bagaimana istilah, ayat, hadis, dan bentuk inferensi berhubungan di dalam teks. Lapisan ketiga ialah evaluasi normatif: bagaimana suatu komunitas menilai kesesuaian doktrin itu dengan batas akidahnya. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik. Dalam artikel ini, dua lapisan pertama menjadi fokus utama; penilaian normatif hanya dilaporkan jika dapat diatribusikan kepada sumber yang jelas.

Pemisahan lapisan tersebut penting karena literatur tentang Ahmadiyah di Indonesia menunjukkan bahwa klaim teologis berkelindan dengan pembentukan identitas, penerimaan institusional, dan wacana tentang kelompok yang dianggap menyimpang (Burhani, 2014a, 2014c). Akan tetapi, dampak sosial tidak dapat dijadikan bukti langsung bagi benar atau salahnya sebuah penafsiran. Sebaliknya, analisis doktrin juga tidak cukup untuk menjelaskan seluruh pengalaman sosial suatu komunitas. Penelitian lintas disiplin dapat menghubungkan analisis teks dengan studi sejarah, sosiologi agama, dan kebijakan publik, tetapi hubungan antarlapisan itu harus dinyatakan secara eksplisit.

Dalam konteks jurnal studi keagamaan, cara penyajian ini memperkuat transparansi akademik. Klaim tentang "pandangan Sunni" sebaiknya diganti dengan ungkapan yang lebih terukur, seperti "dalam tafsir Ibn Kathir yang dianalisis", apabila korpus hanya terdiri atas satu sumber. Demikian pula, klaim tentang "pandangan Ahmadiyah" harus menyebut cabang dan teks yang dijadikan dasar apabila sumbernya terbatas. Penyebutan ruang lingkup secara terbuka membantu pembaca membedakan temuan tekstual yang terverifikasi dari generalisasi yang memerlukan penelitian lebih luas.

Kontribusi dan keterbatasan pembacaan

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pembatasan objek dan transparansi perbandingan. Alih-alih menyebut "Ahmadiyah" dan "Sunni" sebagai dua kesatuan yang homogen, penelitian membandingkan satu teks Ahmadiyah Qadian dengan satu tafsir Sunni klasik. Strategi ini memungkinkan analisis yang lebih terkontrol tentang perbedaan konsep finalitas kenabian, sekaligus mencegah klaim yang melampaui data. Penggunaan literatur Friedmann (1989) dan Beck (2005) membantu menempatkan dua sumber tersebut dalam sejarah pemikiran dan relasi antarkelompok.

Keterbatasan penelitian ini ialah jumlah korpus primer yang terbatas, ketergantungan pada satu terjemahan bahasa Inggris untuk teks Ahmadiyah, dan fokus pada satu tafsir Sunni. Kajian lanjutan dapat memperluas korpus dengan membandingkan tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, dan Ibn Kathir; menelusuri hadis-hadis tentang "tidak ada nabi setelahku" beserta konteks pensyarahannya; serta membaca teks Urdu Mirza Ghulam Ahmad dan karya-karya penerusnya. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan bagaimana cabang Qadian dan Lahore menggunakan istilah nabi, mujaddid, dan muhaddath. Perluasan tersebut akan memungkinkan kesimpulan yang lebih kuat mengenai variasi historis dan konseptual dalam kedua tradisi.

Batasan ini bukan kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari akuntabilitas akademik. Artikel tidak menyatakan bahwa temuan dua teks mewakili semua ulama Sunni atau semua penganut Ahmadiyah. Kesimpulan yang lebih luas hanya dapat diajukan setelah korpus diperluas dan kriteria pemilihan sumber dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, hasil kajian lebih tepat dipahami sebagai perbandingan tekstual yang terfokus daripada survei menyeluruh atas seluruh pemikiran tentang kenabian dalam Islam.

SIMPULAN

Analisis terhadap tafsir Ibn Kathir dan A Misconception Removed menunjukkan bahwa kedua sumber memberikan makna yang berbeda terhadap batas kenabian setelah Nabi

Muhammad. Dalam tafsir Ibn Kathir, QS al-Ahzab [33]:40 dipahami sebagai penegasan bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad, dan pembacaan tersebut diperkuat melalui hadis yang dirujuk dalam penafsirannya (Ibn Kathir, n.d.). Dalam teks Mirza Ghulam Ahmad, penutupan kenabian pembawa syariat independen diterima, tetapi status kenabian pendirinya tetap dipertahankan melalui konsep kenabian yang dipahami sebagai subordinat dan bergantung pada Muhammad (Ahmad, 2007). Dengan demikian, perbedaan utama tidak hanya berada pada penafsiran satu istilah, tetapi pada definisi kenabian dan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah klaim spiritual pasca-Muhammad dapat disebut sebagai kenabian.

Temuan ini mendukung perlunya kajian komparatif yang membedakan deskripsi pandangan internal dari evaluasi normatif. Artikel ini juga menegaskan batas kesimpulannya: dua sumber primer tidak mewakili seluruh ragam tafsir Sunni maupun seluruh cabang Ahmadiyah. Kontribusinya adalah memetakan struktur argumen secara terfokus dan menunjukkan perlunya memperhatikan definisi istilah, hubungan ayat dengan hadis, serta konteks sejarah teks. Penelitian berikutnya perlu memperluas korpus primer, memeriksa edisi bahasa sumber, dan membandingkan lebih banyak tafsir serta karya dari cabang-cabang Ahmadiyah agar gambaran historis dan teologis menjadi lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. G. (2007). *A misconception removed* (new translation). Islam International Publications Ltd. https://www.alislam.org/book/misconception-removed/

Beck, H. L. (2005). The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 161*(2–3), 210–246. https://doi.org/10.1163/22134379-90003708

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Burhani, A. N. (2014a). Hating the Ahmadiyya: The place of "heretics" in contemporary Indonesian Muslim society. *Contemporary Islam, 8*(2), 133–152. https://doi.org/10.1007/s11562-014-0295-x

Burhani, A. N. (2014b). The Ahmadiyya and the study of comparative religion in Indonesia: Controversies and influences. *Islam and Christian-Muslim Relations, 25*(2), 141–158. https://doi.org/10.1080/09596410.2013.864191

Burhani, A. N. (2014c). Treating the Ahmadiyya with fatwas: A study of the Ahmadiyya community in Indonesia. *Contemporary Islam, 8*(3), 285–301. https://doi.org/10.1007/s11562-013-0278-3

Burhani, A. N. (2015). Sectarian translation of the Qur'an in Indonesia: The case of the Ahmadiyya. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 53*(2), 251–282. https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.251-282

Friedmann, Y. (1989). *Prophecy continuous: Aspects of Ahmadi religious thought and its medieval background*. University of California Press.

Ibn Kathir. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim: Surah al-Ahzab, ayah 40*. Quran KSU. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya40.html.